



# Pedagang Wajib Kantongi Izin Kemantren

## ■ Pemkot Yogya Perketat Aturan Pasar Tiban Hewan Kurban

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogyakarta memperketat pengawasan terhadap aktivitas pasar tiban hewan kurban menjelang Iduladha 1447 H. Selain mewajibkan adanya izin resmi, para pelapak hewan kurban juga dilarang keras memanfaatkan aset-aset milik pemerintah untuk tempat berjualan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyampaikan, pihaknya akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai payung hukum yang mengatur keberadaan pasar tiban. Hal ini guna memastikan ketertiban dan kenyamanan di wilayah perkotaan.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur aktivitas pasar tiban. Mereka harus mengajukan izin penjualan ke wilayah (Kemantren)," ujarnya, saat meninjau UD Segar Farm di Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogya, Jumat (8/5).

Wawan menjelaskan, proses perizinan harus didasari oleh rekomendasi dari pihak Kelurahan setempat dengan memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan. Satu di antaranya larangan penggunaan fasilitas atau aset milik pemerintah untuk aktivitas perdagangan hewan.

"Memang ada syarat dan ketentuan yang harus ditaati seluruh pedagang, termasuk tidak boleh menggunakan aset-aset milik pemerintah," terangnya.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Pangarti, mengungkapkan bahwa aspek kesehatan hewan kurban juga menjadi prioritas utama, di mana upaya pemantauan bakal dilakukan secara rutin dan masif.

"Pemantauan kesehatan ini merupakan bagian terpenting dari ekosistem pertanian. Menjelang Idul kurban nanti, kami akan menurunkan petugas, terutama sejak hari H Iduladha sampai hari tasyrik," jelasnya.

### DILARANG PAKAI ASET PEMERINTAH

- Pemkot Yogya memperketat pengawasan terhadap aktivitas pasar tiban hewan kurban menjelang Iduladha 1447 H.
- Para pelapak hewan kurban juga dilarang keras memanfaatkan aset-aset milik pemerintah untuk tempat berjualan.
- Upaya pengawasan menjadi hal krusial karena konsumsi hewan kurban di Kota Yogya banyak didatangkan dari luar daerah.

Merujuk pada skema tahun lalu, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menyiagakan ratusan petugas sekilas untuk menyisir kesehatan ternak di wilayah. Mereka berasal dari berbagai elemen akademisi dan instansi terkait di lingkungan pemerintah kota.

"Tahun kemarin kita turunkan 135 petugas. Mereka bekerja pagi sampai malam untuk memastikan semuanya sesuai prosedur kesehatan," katanya.

**Pasokan luar**  
Pengawasan juga semakin krusial karena kebutuhan hewan kurban di wilayah Kota Yogyakarta banyak didatangkan dari luar daerah. Keterbatasan lahan peternakan membuat Kota Yogyakarta harus bergantung penuh pada pasokan luar daerah.

Saat ini, stok hewan kurban yang tersedia di peternakan lokal dalam kota tercatat sangat minim, baik untuk hewan jenis kambing dan domba maupun sapi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi menyebut, populasi sapi yang ada di peternakan wilayah Kota Yogyakarta saat ini hanya berkisar di angka 200 ekor saja, jauh dari total kebutuhan masyarakat.

"Untuk kambing malah lebih sedikit lagi. Sehingga, sebagian besar hewan kurban untuk masyarakat Kota Yogya harus mendatangkan dari luar," ungkapnya saat meninjau UD Segar Farm Pakuncen, Wirobrajan, Jumat (8/5).

Berdasarkan data tahun 2025, total hewan kurban yang dipotong di wilayah Kota Yogya-

karta sekitar 15.777 ekor, gabungan dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan titik-titik pemotongan di masyarakat.

Di RPH yang dikelola Dinas Pertanian dan Pangan, sebanyak 7.524 ekor hewan disembelih, terdiri dari 2.443 sapi, 1.554 kambing, dan 3.527 domba. Di luar RPH yang tersebar di 600 titik wilayah kota, terdapat 8.253 ekor hewan yang dipotong (2.447 sapi, 1.342 kambing, 4.434 domba).

Melihat tingginya angka tersebut, Sukidi menjelaskan bahwa pasokan dari berbagai daerah di dalam dan sekitar DIY bahkan luar Jawa menjadi tumpuan utama.

"Pasokan banyak datang dari Wonosari (Gunungkidul), kemudian ada yang dari Magelang, Madura, hingga Bali. Tapi, yang paling dominan tetap dari wilayah DIY sendiri, terutama Wonosari," jelasnya.

Meski bergantung pada kirim-an luar daerah, Sukidi menjamin aspek kesehatan hewan tetap menjadi prioritas utama untuk mendapat perhatian penuh dari instansinya. Setiap hewan yang masuk ke wilayah Kota Yogyakarta wajib melalui proses skrining dokumen dan pemeriksaan fisik, dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Sertifikat Veteriner.

"Pasti kami cek setiap hari. Sejak pedagang diizinkan berjualan sampai nanti akhir masa jualan, petugas akan berkeliling memeriksa kesehatan hewan di lapak-lapak. Meskipun sudah membawa SKKH, pemeriksaan fisik tetap kami lakukan untuk memastikan hewan benar-benar layak kurban," tegasnya. (aka)



TINJAU UD SEGAR FARM - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, saat meninjau UD Segar Farm di Pakuncen, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Jumat (8/5).

| Instansi                      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Wakil Walikota             | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Pertanian dan Pangan |              |       |                 |

Yogyakarta, 07 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005